

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya jika dilihat dari jumlah penduduk. Selain itu, Kota Bandung juga merupakan Kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Sedangkan wilayah Bandung Raya (Wilayah Metropolitan Bandung) merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Gerbang Kertosusilo (Gerbang Kertosusilo).

Banyaknya penduduk di Kota Bandung salah satu penyebabnya adalah banyaknya pendatang dari luar kota dari tahun ke tahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan melanjutkan pendidikan di Kota Bandung.

Penduduk yang datang ke Kota dari desa untuk bekerja, pada umumnya adalah urban miskin. Namun demikian, mereka merasakan bahwa kesempatan hidup, mendapat pekerjaan dan gaji yang lebih baik, lebih memungkinkan daripada jika mereka tetap tinggal di desa.

Tekanan arus penduduk dari desa ke kota semakin tahun yang semakin meningkat, berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang di sediakan di Kota Bandung. Hal tersebut disebabkan pula karena umumnya orang-orang yang masuk ke Kota tidak dipersiapkan dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, akibatnya banyak bermunculan pengangguran yang tidak memiliki

kemampuan ditambah lagi sulit untuk mendaftar pekerjaan di sektor formal melihat syarat akademiknya yang tidak memenuhi, sehingga pilihan satu-satunya adalah mencari pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan, salah satunya adalah dengan berjualan sebagai pedagang kaki lima.

Dalam upaya membangun kota/kabupaten yang bersih, tertib dan indah, pemerintah daerah seringkali melakukan penataan PKL yang kontraproduktif. Saat ini, Pemkot Bandung masih mengalami kesulitan untuk melakukan penataan dan penertiban dengan merelokasikan PKL di tempat-tempat yang telah disediakan. Pelaksanaan kebijakan relokasi PKL sering dihadapkan oleh persoalan ketidaksesuaian harapan PKL atas lokasi baru. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian Pemkot Bandung dalam relokasi PKL adalah kawasan Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul. Pelaksanaan relokasi PKL di kawasan ini memiliki beberapa keunikan yaitu kelompok PKL ini memiliki ikatan kelompok (solidaritas) yang kuat dan memiliki status kepemilikan atas prasarana usaha. Pada pelaksanaannya, relokasi PKL tersebut tidak berjalan efektif karena ketidaksesuaian lokasi baru dengan kemampuan dan kebutuhan usaha PKL.

Dalam konteks mudah tidaknya masalah yang akan digarap, kebijakan relokasi sulit dilaksanakan berkaitan dengan kesadaran PKL masih kurang untuk menerima relokasi. Dalam hal kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi secara tepat diperoleh belum optimalnya sosialisasi petugas tentang relokasi disertai kurangnya pembentukan kesadaran PKL ke arah yang dikehendaki.

Antropolog Inggris bernama Keith Hart sekitar tahun 1971 pertama kali memperkenalkan gagasannya tentang kegiatan ekonomi dibagi ke dalam sektor formal dan sektor informal (Rachbini, 1994: 26). Istilah ini diperkenalkan untuk menjelaskan sejumlah aktivitas tenaga kerja yang berada di luar pasar tenaga kerja formal yang terorganisasi. Disebutkan dengan kalimat “di luar pasar” karena sektor ini termasuk kelompok yang tidak permanen atau tidak ada jaminan tentang keberlangsungan pekerjaan yang dimilikinya. Bahkan kelompok informal ini menggunakan teknologi produksi yang sederhana dan padat karya, tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas serta dilakukan oleh anggota keluarga.

Jan Bremen (dalam Manning dan Effendi, 1996: 138-140) memperjelas pengertian sektor informal dengan menyatakan bahwa sektor informal menunjukkan fenomena perbedaan dua kegiatan yang mempunyai ciri-ciri yang berlawanan. Tenaga kerja formal adalah yang bergaji dalam suatu pekerjaan yang permanen. Sifat semacam ini umumnya dimiliki oleh kegiatan yang saling berhubungan dalam suatu sistem yang terjalin dengan organisasi yang baik. Pada umumnya mereka yang terikat dalam kontrak kerja kelompok ini mempunyai syarat-syarat bekerja yang dilindungi oleh hukum. Sebaliknya, mereka yang berada di luar kelompok ini dinamakan sektor informal.

Studi mendalam tentang sektor informal di Indonesia dilakukan oleh Hans Dieter Evers, yang menganalogikan sektor ini sebagai bentuk ekonomi bayangan dengan Negara. Ekonomi bayangan digambarkan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. Kegiatan ekonomi bayangan ini merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang bergerak dalam unit-unit

kecil sehingga dapat dipandang efisien dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari sisi sifat produksinya, kegiatan ini bersifat subsistem yang bernilai ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang ada di lingkungan sektor informal.

Sektor informal atau pedagang kaki lima adalah unit-unit usaha yang tidak memperoleh proteksi pemerintah dan sektor ini tidak mempergunakan bantuan atau fasilitas pemerintah meskipun bantuan telah tersedia. Kriteria adanya *accessibility* terhadap fasilitas yang disediakan pemerintah adalah yang dipakai sebagai ukuran untuk membedakan usaha sektor formal dan informal.

Sektor informal muncul ke permukaan karena sektor formal tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor yang terorganisasi. Sektor utama yang diisi oleh golongan kurang mampu ini terlihat semakin menjamur di Negara sedang berkembang. Karena kegiatannya dipandang ilegal, para pengamat menamakan kegiatan ini sebagai kegiatan ekonomi bawah tanah atau *underground economy* (Jamaludin, 2015: 281).

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Bandung sering kali dijumpai banyak menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan menjadi paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar, di taman-taman kota bahkan terkadang di badan jalan. Pemandangan ini hampir terdapat di sepanjang jalan kota, salah satunya di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul.

Pemandangan ini tidak hanya terjadi di siang hari bahkan di malam hari pun jumlahnya semakin bertambah. Kemudian dengan makin marak dan bertambahnya pedagang kaki lima yang kian bermunculan yang menjadi penyebab kemacetan dan merusak keindahan kota.

Dengan adanya pedagang kaki lima ini, banyak limbah yang berserakan di sepanjang jalan dan membuat macet jalanan. Pedagang kaki lima masih dianggap banyak menimbulkan masalah dan tidak mau direlokasi. Dengan adanya penelitian ini, kita bisa mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Pedagang Kaki Lima ini tidak mau di relokasi, khususnya di Kecamatan Cibeunying Kidul.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pedagang Kaki Lima membuat macet di sepanjang jalan Kecamatan Cibeunying Kidul.
2. Pedagang Kaki Lima masih membuat kesan kumuh dan merusak keindahan tatanan kota.
3. Banyak pedagang kaki lima yang tidak mau direlokasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Cibeunying Kidul ?
2. Program apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Cibeunying Kidul ?

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Kecamatan Cibeunying Kidul tidak mau di relokasi ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah Pedagang Kaki Lima Kecamatan Cibeunying Kidul.
2. Untuk mengetahui program yang dilakukan Pemerintah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Cibeunying Kidul.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Kecamatan Cibeunying Kidul tidak mau di relokasi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan disusun nya rumusan masalah di atas, maka kegunaan penelitian ini diharapkan mempunyai 2 kegunaan yang berbeda, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dalam mengaplikasikan Ilmu Sosiologi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pedagang kaki lima agar mau di relokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga dengan begitu, pedagang kaki lima tidak akan dipandang sebagai sesuatu yang banyak menimbulkan masalah lagi, akan tetapi pedagang kaki lima dapat dipandang sebagai orang-orang yang dapat menjaga dan melestarikan kota nya sendiri.

1.6 Kerangka Pemikiran

Seiring berjalannya waktu, bahkan dengan semakin maraknya Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung khususnya di daerah Cicadas ini, jelas banyak sekali menimbulkan permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak ada.

Fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Bandung adalah semakin banyaknya para Pedagang Kaki Lima, akibatnya semakin membuat jalanan menjadi macet, sampah berserakan dimana-mana, dan terutama sering menimbulkan jalanan menjadi macet dan menimbulkan adanya bencana banjir.

Masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, atau dalam arti kita tidak berhak melarang para Pedagang Kaki Lima agar tidak berjualan lagi, tetapi setidaknya bisa saling mengingatkan mereka untuk mau di relokasi dan selalu menjaga kebersihan Kota Bandung ini.

Setidaknya, jika pedagang kaki lima ini mau di relokasi, kemacetan di sepanjang jalan Kecamatan Cibeuuying Kidul mungkin akan berkurang. Dengan adanya kerja sama untuk memelihara kebersihan dan keindahan Kota ini, Pedagang Kaki Lima tidak akan lagi dipandang sebagai sesuatu yang banyak menimbulkan masalah, tetapi mereka akan dipandang sebagai orang yang luar biasa yang bisa memperhatikan lingkungan sekitarnya agar tidak terkena bahaya banjir.

Guna melengkapi penelitian ini, peneliti mengambil salah satu teori tindakan sosial dalam Kamus Sosiologi adalah suatu tindakan yang dilakukan pribadi dalam situasi sosial (Soekanto, 2007 : 9). Sitorus yang dikutip oleh Basrowi (2005 : 138) menjelaskan bahwa tindakan sosial sebagai perbuatan,

perilaku atau aksi yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap tindakan diperoleh melalui proses belajar. Artinya, sebelum manusia berbuat sesuatu, akan mengadakan seleksi atau pilihan terhadap berbagai alternatif untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Tindakan sosial adalah semua perilaku- perilaku individu-individu yang didasarkan pada motivasi yang tinggi dengan tindakan perilaku individu tersebut yang memberikan arti subjektif, tindakan itu disebut sosial karena tujuan-tujuan melalui tindakan-tindakan sosial di dalam masyarakat (Jhonson, 1986 : 214). Arti subjektif tersebut dihubungkan dengan individu yang ingin bertindak yang mengarah kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya dengan melibatkan berbagai pihak-pihak dalam suatu bidang seperti sampah atau sarana pengelolaan sampah.

Menurut Max Weber dunia ini terwujud karena tindakan sosial di masyarakat yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukannya dan ditunjukkan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan , kemudian melakukan tindakan.

Kehidupan sosial dengan Tuhan maupun dengan berbagai jenis tindakan sosial, tindakan ini diperoleh melalui proses belajar, baik secara formal maupun informal yang telah diajarkan sejak dini. Tindakan sosial menunjukkan bahwa manusia harus berfikir aktif dan tidak bisa diam dalam menjalani kehidupan di dunia ini karena manusia hanya bisa memilih mana yang baik dan buruk tergantung manusia itu sendiri mau memilih mana asal tidak merugikan diri

sendiri dan orang lain. Mereka harus bekerja, belajar dan berhubungan dengan manusia lainnya, tentunya ini memiliki motif tertentu yang dimiliki oleh setiap individu.

